



PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2012

Rizal Qowi

Tri Jatmiko Wahyu Prabowo¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to prove that the level of wealth, dependence to the central government, capital expenditure of local government, and the audit finding of BPK, are influential for performance of local governments of Indonesia in 2012. The performance is measured by scores in the EPPD's evaluation report that arranged nationally by Ministry of Home Affairs.

Population of this research is whole of Indonesia's local governments in 2012. Total of samples are 477 local governments that consist of 384 regencies and 93 cities. This research uses purposive sampling method and SPSS 21 software as the analysis program.

The result shows that the level of wealth of local government has positif effect for it's performance, but the level of dependence to the central government, the level of capital expenditure, and the audit finding of BPK have negatif effect for it's performance.

Keywords: local government's performance, local government's characteristics, local government performance report, EKPPD,

PENDAHULUAN

Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan secara fundamental sejak diterapkannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 22/1999 tentang "Pemerintahan Daerah" yang diubah dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang "Pemerintahan Daerah" yang diubah lagi dengan Undang-Undang No. 23/2014 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah" yang diubah dengan Undang-Undang No. 33/2004 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah". Menurut Adi (2006) kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia belum menunjukkan hasil yang baik meskipun sudah dijalankan lebih dari satu decade. Menurut Jaweng (2014) secara umum desain kebijakan dan praktik (kinerja) pemerintahan daerah kita sejauh ini belum mampu membuktikan desentralisasi sebagai jalan membangun Indonesia dari daerah. Terdapat ketidakseimbangan antara kapasitas lokal yang belum terbangun kuat dibandingkan dengan otoritas yang diberikan kepada pemerintah daerah yang begitu besar. Selain itu sisi akuntabilitas masih lemah, dan kontrol pusat atas daerah belum berjalan efektif. Padahal menurut Curristine dkk (2007) desentralisasi merupakan salah satu dari tiga faktor institusional yang dapat meningkatkan kinerja lembaga sektor

¹ Corresponding author

publik, sehingga seharusnya pemerintah daerah di Indonesia juga dapat meningkatkan kinerjanya seiring dengan lamanya penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini.

Pengendalian atau kontrol dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan dalam rangka menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Pengendalian atau kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja yang dimaksud adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain evaluasi dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, upaya perbaikan kinerja pemerintah daerah juga dilakukan dengan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk mewujudkan asas *good governance*, yaitu transparansi dan akuntabilitas dalam bidang keuangan. Kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas keuangan ini diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang “Keuangan Negara” pasal 31 ayat (1) yang berbunyi “*Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir*”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2012.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara dua belah pihak atau lebih, dimana satu pihak yang berperan sebagai agen setuju bertindak dengan persetujuan pihak lain (principal). Stiglitz (dalam Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan bahwa hubungan prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang dilakukan seseorang memiliki dampak pada orang lain atau ketika seseorang sangat tergantung pada tindakan orang lain, dimana pengaruh atau ketergantungan ini diwujudkan dalam kesepakatan-kesepakatan dalam struktur institusional pada berbagai tingkatan, seperti norma perilaku dan konsep kontrak.

Lane (dalam Halim dan Abdullah, 2006) menyatakan bahwa teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik dan negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen. Sejalan dengan hal tersebut Mulgan, Shi & Svenson, dan Lupia (dalam Fadzil dan Nyoto, 2011) menyatakan bahwa teori keagenan telah digunakan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks antara berbagai instansi pemerintah.

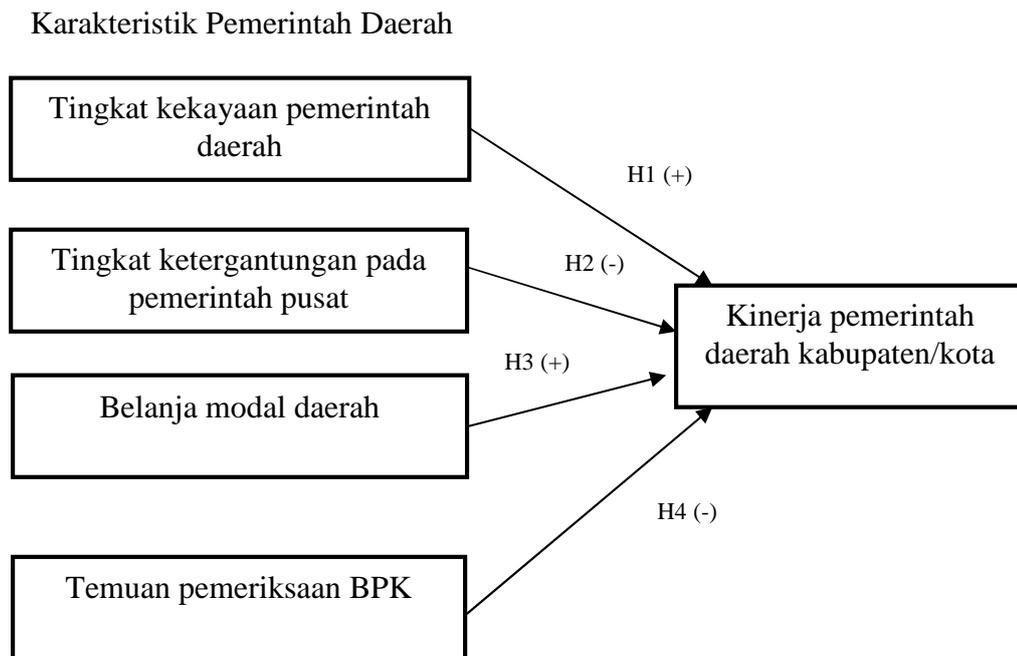
Dalam konteks penelitian tentang pemerintahan daerah di Indonesia, teori keagenan dapat diterapkan karena pemerintah daerah terlibat dalam beberapa hubungan keagenan dengan beberapa pihak pula. Pemerintah berperan sebagai agen dari beberapa pihak yang berperan sebagai prinsipal, yaitu pemerintah pusat sebagai subordinatnya, dewan perwakilan rakyat daerah, dan masyarakat.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2012. Karakteristik pemerintah daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, dan belanja modal. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Nurdin (2015) dengan perbedaan pada komposisi variabel independen dan sumber data penelitian.

Dalam penelitian ini tingkat kekayaan dihipotesiskan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, tingkat ketergantungan dihipotesiskan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, belanja modal daerah dihipotesiskan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan temuan pemeriksaan BPK dihipotesiskan memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berikut adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Pengaruh Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tingkat kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (Abdullah, 2004). Mustikarini dan Fitriyani (2012) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli daerah (PAD) beragam yang salah satunya tergantung dari kekayaan daerah yang dimilikinya. Pemda yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan kekayaan asli daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang dapat meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat sehingga kinerjanya juga diharapkan semakin baik. Rusmin, dkk (2014) membuktikan bahwa penerimaan PAD yang semakin meningkat akan meningkatkan kemampuan untuk membiayai layanan masyarakat yang diberikan pemerintah daerah.

Dari perspektif teori keagenan, keberhasilan pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai agen dari pemerintah pusat antara lain dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri, dimana salah satunya dapat dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah yang memiliki jumlah PAD yang besar menunjukkan keberhasilannya dalam berperan sebagai agen penerima kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola sumberdaya daerahnya sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kekayaan melalui PAD pada akhirnya akan meningkatkan skor kinerja yang diterima dari pemerintah pusat. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 : *Tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.*

Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Tingkat ketergantungan suatu *municipal* (pemerintah daerah) terhadap sumber pendapatan dari luar dapat direpresentasikan melalui *intergovernmental revenue* (Copley, 1991). Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia *intergovernmental revenue* adalah dana perimbangan dari pemerintah pusat yang salah satunya adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Green (2005) menyatakan bahwa desentralisasi yang ada di Indonesia lebih kepada desentralisasi administrasi daripada desentralisasi fiskal, hal ini dikarenakan pemerintah pusat masih membagi pendapatan negara untuk kebutuhan pemerintah daerah. Tingginya persentase jumlah DAU maupun dana perimbangan lainnya mengindikasikan ketidakmandirian pemerintah daerah dalam pembiayaan program atau kegiatannya. Ketidakmandirian tersebut nantinya dapat menyebabkan kinerja pemerintah daerah juga rendah.

Dalam konteks hubungan keagenan antara pemerintah pusat (ordinat) sebagai prinsipal dan pemerintah daerah (subordinat) sebagai agen, pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi menunjukkan ketidakmampuannya berperan sebagai agen yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan delegasi wewenang pengelolaan daerahnya sendiri pada akhirnya menghasilkan penilaian kinerja yang buruk dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Julitawati dkk (2012) menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penelitian yang dilakukan oleh Fontanella dan Rossieta (2014) juga menemukan bahwa ketergantungan pada Pemerintah Pusat berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Selain itu penelitian Wahyuningsih (2016) juga menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_2 : *Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota*

Pengaruh Belanja Modal Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk masyarakatnya semakin meningkat juga pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga kinerja daerah akan lebih baik. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sudarsana (2013) menemukan bahwa belanja berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Dalam hubungan keagenan, pemerintah daerah sebagai agen dari legislatif dan publik mengharapkan agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik sehingga mendapat penilaian positif dari legislatif dan publik. Salah satu indikasi dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah banyaknya infrastruktur yang dibangun yang tercermin dari besarnya porsi belanja modal dalam APBD. Kebijakan meningkatkan porsi belanja modal juga merupakan indikasi pemerintah daerah benar-benar menjalankan tugasnya sebagai agen untuk kepentingan publik dan legislatif sebagai prinsipalnya. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis pada penelitian ini adalah:

H₃: *Belanja modal berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota*

Pengaruh Temuan Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud akuntabilitas maka laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tersebut harus diperiksa oleh BPK sebagai pemeriksa eksternal pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD. Salah satu bagian dalam LHP tersebut adalah Laporan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan yang menggambarkan ketaatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Temuan dalam laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Dalam hubungan antara pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, sebagai agent dan masyarakat sebagai principal, konflik bisa terjadi jika terjadi suatu asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang tertuang dalam APBD dibandingkan dengan masyarakat. Adanya asimetri informasi mengenai keuangan daerah inilah yang dapat menyebabkan pemerintah daerah berlaku *moral hazard*, mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah untuk kepentingannya sendiri. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah temuan pemeriksaan BPK yang tinggi menunjukkan bahwa perilaku oportunistik (*moral hazard*) masih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Seharusnya adanya pemeriksaan BPK dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk meminimalisasi risiko terjadinya moral hazard dan bentuk masalah keagenan lain di lingkungan pemerintah daerah.

Kuntadi (2008) menyatakan bahwa dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat dilihat berapa dana APBD yang digunakan untuk melaksanakan kinerja yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa temuan menggambarkan penyimpangan yang terjadi selama proses pelaksanaan program/kegiatan, semakin tinggi jumlah temuan berarti dalam pelaksanaan APBD terdapat sumber daya yang digunakan untuk kepentingan lain selain tujuan/sasaran yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, jumlah temuan pemeriksaan BPK sejatinya menggambarkan seberapa rendahnya kinerja pemerintah daerah, semakin besar jumlah temuan pemeriksaan BPK maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sudarsana (2013) membuktikan bahwa temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis penelitian ini adalah:

H₄: *Temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota*

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2012. Dalam penelitian ini variabel kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang berasal dari laporan hasil evaluasi peneringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD tahun 2012 tingkat nasional yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi dilakukan berdasarkan penilaian portofolio secara *desk evaluation* terhadap data yang dimuat dalam LPPD 2012.

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah, dan temuan pemeriksaan BPK. Variabel tingkat kekayaan pemerintah daerah diukur dengan jumlah PAD dibandingkan dengan total pendapatan. Penggunaan proksi tersebut dimaksudkan agar perbandingan kekayaan antar daerah menjadi merata dan *fair*, karena masing-masing daerah mempunyai jumlah PAD yang beragam tergantung dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerahnya, sehingga akan tergambar berapa persentase PAD dalam Pendapatan Daerah. Variabel tingkat ketergantungan pada pemerintah memiliki pengukuran yang mengacu pada penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sudarsana (2013), yaitu perbandingan antara jumlah DAU dan total pendapatan daerah. Terkait variabel belanja modal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2012) menyatakan bahwa salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pengukuran variabel belanja modal daerah jumlah belanja modal dibandingkan dengan total belanja daerah. Temuan pemeriksaan BPK dalam penelitian ini menggunakan jumlah temuan (dalam rupiah) yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam rangkaian pemeriksaan LKPD yang dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah. Hal ini disebabkan temuan pemeriksaan BPK atas LKPD dipengaruhi besaran belanja daerah, semakin besar belanja maka kecenderungan temuan akan meningkat.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kota / kabupaten di Indonesia tahun 2012. Kriteria pengambilan sampel penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan ketentuan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih memiliki data PAD, DAU, total pendapatan, belanja modal, dan total belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam *website* <http://www.djpk.depkeu.go.id/>. Kriteria berikutnya adalah pemerintah daerah yang dijadikan sampel harus memiliki data skor kinerja yang tertera dalam Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri melalui *website* <http://otda.kemendagri.go.id>. Kriteria terakhir adalah pemerintah daerah yang dijadikan sampel harus memiliki data jumlah temuan kepatuhan atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 dan 2 dari Badan Pemeriksa Keuangan melalui *website* <http://www.bpk.go.id>.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari estimasi model persamaan regresi, uji asumsi klasik, dan uji kelayakan model/uji hipotesis. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = + 1Kekayaan - 2Ketergantungan + 3BM - 4Temuan$$

Keterangan:

Y	= Kinerja pemerintah daerah
1 - 4	= Koefisien Konstanta
Kekayaan	= Tingkat Kekayaan Pemerintah Daerah
Ketergantungan	= Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat
BM	= Belanja modal daerah
Temuan	= Temuan pemeriksaan BPK RI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2012 yang berjumlah 477 pemerintah daerah, terdiri dari 384 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan kriteria pengambilan sampel yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu hanya pemerintah daerah yang memiliki data lengkap berupa skor kinerja dari Kementerian Dalam Negeri, data Laporan Realisasi Anggaran yang dirilis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan data temuan pemeriksaan atas kepatuhan undang-undang yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I atau II tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan, maka diperoleh jumlah sampel akhir sebanyak 398 pemerintah daerah. Proses pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Prose Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Total jumlah pemerintah daerah tahun 2012	510
Pemerintah daerah setingkat provinsi	(33)
Pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak memiliki skor kinerja/tidak memiliki LRA dari DJPK/tidak terdapat dalam IHPS 2013 dari BPK	(79)
Data <i>outlier</i>	(2)
Jumlah sampel akhir	396

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tampilan output perangkat lunak statistik berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja	2,248857	,6572459	396
Kekayaan	,073596	,0621540	396
Ketertanggung	,600180	,1479908	396
BM	,224666	,0812035	396
Temuan	,006922	,0118106	396

Dari Tabel 2 di atas dapat diketahui jumlah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 396 pemerintah daerah. Skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan rata-rata berada pada kategori tinggi yaitu sebesar 2,248857. Tingkat kekayaan pemerintah daerah di Indonesia yang diukur dari porsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata masih tergolong rendah, yaitu sebesar 7,4%. Tingkat ketertanggung pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat rata-rata masih tergolong tinggi yaitu sebesar 60%. Hal ini berarti lebih

dari separuh pendapatan daerah adalah transfer dari pemerintah pusat. Secara rata-rata tingkat belanja modal pemerintah daerah di Indonesia masih tergolong rendah yaitu hanya sebesar 22,5% dari total belanja. Sementara itu rata-rata tingkat temuan pemeriksaan BPK ada pemerintah daerah di Indonesia adalah sebesar 7% dari total belanja pemerintah daerah.

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Model*)

Uji kelayakan model dalam penelitian ini terdiri dari koefisien determinasi (*Adjusted R²*), uji signifikansi simultan (uji F), dan uji signifikansi parameter individual (uji t). Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel-variabel independen mampu menjelaskan variasi dari variabel dependennya.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* yang dihasilkan adalah 0,287. Hal ini berarti bahwa 28,7% variasi variabel kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK, sedangkan 71,3% variasi variabel kinerja pemerintah daerah sisanya dijelaskan oleh variabel independen lain di luar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil uji F yang sudah dilakukan, diperoleh nilai F sebesar 39,390 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,005$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara simultan keempat variabel independen dalam penelitian ini yaitu variabel tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil uji t yang sudah dilakukan diketahui bahwa variabel tingkat kekayaan memiliki nilai sig. 0,000 atau $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel tingkat kekayaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan memiliki nilai sig. 0,000, atau $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Variabel belanja modal memiliki nilai sig. 0,005 atau $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Sementara itu variabel temuan pemeriksaan memiliki nilai sig. 0,000 atau $< 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel temuan pemeriksaan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semua variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya.

Interpretasi Hasil

Untuk mengetahui arah pengaruh dari variabel tingkat kekayaan, tingkat ketergantungan, belanja modal, dan temuan pemeriksaan terhadap variabel kinerja pemerintah daerah maka digunakan koefisien regresi Beta Standardized karena penelitian ini tidak menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat.

Tabel 3
Koefisien Regresi

Model		Standardized Coefficients
		Beta
1	(Constant)	
	Kekayaan	,246
	Ketergantungan	-,292
	BM	-,141
	Temuan	-,170

Sumber: Olah data statistik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat kekayaan memiliki pengaruh positif terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Variabel tingkat ketergantungan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Variabel belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap variabel kinerja pemerintah daerah. Variabel temuan pemeriksaan memiliki pengaruh negatif terhadap variabel kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Kekayaan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Dari hasil penelitian diketahui bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar tingkat kekayaan pemerintah daerah semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah.

Dari perspektif teori keagenan, keberhasilan pemerintah daerah menjalankan perannya sebagai agen dari pemerintah pusat antara lain dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang pengelolaan sumber daya daerahnya sendiri, dimana salah satunya dapat dilihat dari besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah yang memiliki jumlah PAD yang besar menunjukkan keberhasilannya dalam berperan sebagai agen penerima kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola sumberdaya daerahnya sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kekayaan melalui PAD pada akhirnya akan meningkatkan skor kinerja yang diterima dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang disampaikan dalam penelitian ini yaitu bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasari (2012) dan Nurdin (2015) yang menyatakan bahwa variabel kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat maka semakin rendah skor kinerja pemerintah daerah. Sebaliknya semakin rendah tingkat ketergantungan, maka semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah.

Dalam konteks hubungan keagenan antara pemerintah pusat (ordinat) sebagai prinsipal dan pemerintah daerah (subordinat) sebagai agen, pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi menunjukkan ketidakmampuannya berperan sebagai agen yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan delegasi wewenang pengelolaan daerahnya sendiri pada akhirnya menghasilkan penilaian kinerja yang buruk dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang sudah disampaikan pada bab sebelumnya yaitu bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurdin (2015) dan Utomo (2015) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin besar tingkat belanja modal semakin rendah skor kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang disampaikan di bab sebelumnya yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota.

Semakin besar tingkat belanja modal daerah semestinya memberi dampak yang positif terhadap kinerja pemerintah daerah tersebut. Akan tetapi dari perspektif teori keagenan hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi. Dalam konteks hubungan keagenan pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif, terdapat kecenderungan masing-masing pihak atau kedua pihak secara bersama-sama melakukan moral hazard dalam rangka memaksimalkan utility-nya sendiri. Saat proses penganggaran belanja modal dapat dimungkinkan terjadinya budgetary slack, yaitu kondisi dimana jumlah belanja modal yang dianggarkan tidak mencerminkan kapasitas atau kemampuan belanja modal daerah itu yang sebenarnya, sehingga kinerja yang mereka hasilkan tidak optimal.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang disampaikan sebelumnya, tetapi hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) dan Sudarsana (2013) yaitu bahwa belanja berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota.

Pengaruh Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil penelitian ini menunjukkan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin besar temuan pemeriksaan BPK semakin rendah skor kinerja pemerintah daerah. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil temuan pemeriksaan BPK semakin tinggi skor kinerja pemerintah daerah.

Dalam hubungan antara pemerintah daerah, dalam hal ini eksekutif, sebagai agent dan masyarakat sebagai principal, konflik bisa terjadi jika terjadi suatu asimetri informasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah memiliki lebih banyak informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang tertuang dalam APBD dibandingkan dengan masyarakat. Adanya asimetri informasi mengenai keuangan daerah inilah yang dapat menyebabkan pemerintah daerah berlaku moral hazard, mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara dan daerah untuk kepentingannya sendiri. Pemerintah daerah yang memiliki jumlah temuan pemeriksaan BPK yang tinggi menunjukkan bahwa perilaku oportunistik (moral hazard) masih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Seharusnya adanya pemeriksaan BPK dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk meminimalisasi risiko terjadinya moral hazard dan bentuk masalah keagenan lain di lingkungan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang disampaikan di bab sebelumnya yaitu bahwa temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012) yang menemukan bahwa temuan audit (pemeriksaan) BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa tingkat kekayaan pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal daerah dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada tahun anggaran 2012. Dari penelitian ini disimpulkan hasil sebagai berikut:

1. Karakteristik pemerintah daerah yang diwakili tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal, dan temuan pemeriksaan BPK dan temuan pemeriksaan BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan sebelumnya, kecuali untuk variabel belanja modal.
3. Tingkat kekayaan berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari perspektif teori keagenan, pemerintah daerah yang memiliki jumlah

PAD yang besar menunjukkan keberhasilannya dalam berperan sebagai agen penerima kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola sumberdaya daerahnya sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kekayaan melalui PAD pada akhirnya akan meningkatkan skor kinerja yang diterima dari pemerintah pusat.

4. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks hubungan keagenan antara pemerintah pusat (ordinat) sebagai prinsipal dan pemerintah daerah (subordinat) sebagai agen, pemerintah daerah yang memiliki tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tinggi menunjukkan ketidakmampuannya berperan sebagai agen yang mendapatkan pendelegasian wewenang untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan delegasi wewenang pengelolaan daerahnya sendiri pada akhirnya menghasilkan penilaian kinerja yang buruk dari pemerintah pusat.
5. Tingkat belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dalam konteks hubungan keagenan pemerintah daerah (eksekutif) dan legislatif, terdapat kecenderungan masing-masing pihak atau kedua pihak secara bersama-sama melakukan moral hazard dalam rangka memaksimalkan utility-nya sendiri. Saat proses penganggaran belanja modal dapat dimungkinkan terjadinya budgetary slack, yaitu kondisi dimana jumlah belanja modal yang dianggarkan tidak mencerminkan kapasitas atau kemampuan belanja modal daerah itu yang sebenarnya, sehingga kinerja yang mereka hasilkan tidak optimal.
6. Temuan pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Dari sudut pandang keagenan, pemerintah daerah yang memiliki jumlah temuan pemeriksaan BPK yang tinggi menunjukkan bahwa perilaku oportunistik (moral hazard) masih kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Seharusnya adanya pemeriksaan BPK dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk meminimalisasi risiko terjadinya moral hazard dan bentuk masalah keagenan lain di lingkungan pemerintah daerah.

Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2012, sehingga kurang mencerminkan kondisi yang terjadi saat ini atau dengan kata lain relevansi datanya kurang. Hal ini disebabkan karena data terbaru untuk skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dari Kementerian Dalam Negeri adalah tahun tersebut.
2. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variasi variabel dependen sebesar 28,7% saja. Dengan demikian 71,3% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Saran

Saran dari peneliti terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data skor kinerja yang lebih baru, agar lebih mencerminkan kondisi saat ini sehingga hasil penelitian lebih relevan untuk digunakan.
2. Penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel lain yang menjadi indikator kinerja kunci (IKK) dalam penilaian kinerja pemerintah daerah, seperti yang terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah dan bidang urusan wajib yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Hal ini dimaksudkan agar variabel yang digunakan dapat lebih menjelaskan variasi variabel kinerja pemerintah daerah.

REFERENSI

- Abdullah, S. 2004. “*Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*”. Diakses pada 18 Agustus 2016 dari <https://www.researchgate.net/publication/303961090>
- Adi, P.H. 2006. “*Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan Dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*”. Forum: Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Diakses pada 20 Maret 2016 dari <http://www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id>.
- Copley, P.A. 1991. “*The Association Between Municipal Disclosure Practises and Audit Quality*”. Athens. Elsevier Science Publishing. Journal of Accounting and Public Policy, 10, 245-291. Diakses pada 24 September 2016
- Curristine dkk. 2007. “*Improving Public Sector Efficiency: Challenges and Opportunities*”. OECD Journal on Budgeting Volume 7 – No. 1 diakses pada 24 September 2016
- Fadzil, F.H. dan H. Nyoto. 2011. “*Fiscal Decentralization after Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia*”. World Review of Business Research Vo. 1 pp. 51-70.
- Fontanella, A. dan H. Rossieta. 2014. “*Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*”. Forum Simposium Nasional Akuntansi 17 Mataram. Diakses pada 26 Mei 2016 dari <http://multiparadigma.lecture.ub.ac.id>.
- Green, K. 2005. “*Decentralization and good governance: The case of Indonesia*”. MPRA Paper No. 18097, diakses pada 26 Mei 2016 dari <http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18097/>
- Halim, A. dan S. Abdullah. 2006. “*Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi*”. Diakses tanggal 18 April 2016 dari <http://kelembagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdulhalim-dan-syukriy-abdullah/>.
- Jaweng, E. 2014. “*Pemekaran Dipaksakan, Daerah Otonomi Baru Sulit Berkembang*”. Diakses 15 Agustus 2016 dari <http://www.kppod.org>
- Julitawati dkk. 2012. “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh*”. Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Kuntadi, C. 2008. “*Sekilas Tentang Dana Perimbangan*” Majalah Pemeriksa No. 112 April s.d. Juni 2008, h. 21.
- Mustikarini, W.A. dan D. Fitriyani. 2012. “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007*” Forum: Simposium Nasional Akuntansi 15, diakses tanggal 27 Januari 2016 dari <http://www.sna.akuntansi.unikal.ac.id>.
- Nurdin, F. 2015. “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK RI Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 3 No.1, Diakses pada 4 Februari 2016 dari <http://jimfeb.ub.ac.id>.
- Rusmin, R., dkk. 2014. “*Local Government Units in Indonesia: Demographic Attributes and Differences in Financial Condition*”. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 8(2), p. 88-109.
- Sudarsana, H.S. dan S.N. Rahardjo. 2013. “*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia)*”. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2, h. 1-13. Diakses pada 6 Juni 2016 dari <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.



Wahyuningsih, Y.E. 2016. *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah”*. Naskah Publikasi Skripsi Universitas Sebelas Maret.